

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan pengumpulan data dari berbagai literatur yang telah melalui serangkaian teknik analisis terdapat beberapa temuan mengenai kebijakan Selandia Baru dalam mencapai perdagangan Inklusif Māori melalui CPTPP. Diketahui bahwa CPTPP menjadi salah satu perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam jangkauan agenda “trade for all” sebagai langkah Selandia Baru untuk membawa perdagangan internasional menjadi inklusif bagi semua kelompok, termasuk Māori. Meskipun demikian, agenda tersebut baru secara resmi diluncurkan di tahun 2019 yang dimana pada tahun tersebut CPTPP sudah berhasil diratifikasi oleh Selandia Baru, sehingga trade for all tidak dapat menjangkau sepenuhnya terkait CPTPP terutama dalam tahapan-tahapan sebelum diratifikasinya perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Melihat bagaimana gugatan dan kritik yang terjadi selama periode 2019-2023 berdasarkan beberapa laporan resmi yang dipublikasikan baik yang berasal dari tribunal waitangi, TFAAB, ataupun laporan tahunan MFAT menjadi bukti yang jelas bahwa masih cukup banyak kekurangan dalam kebijakan oleh Selandia Baru. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh beberapa hal, seperti konsultasi yang kurang mendalam khususnya terhadap *treaty partner* (Māori) selama proses negosiasi, dimana pemerintah dinilai cenderung memperlakukan kelompok Māori sebagai *stakeholder* dibandingkan *treaty partner* yang berakibat beberapa kebijakan dinilai kurang relevan berdasar traktat waitangi.

Keterbatasan pemahaman pemerintah terhadap traktat juga dinilai sebagai salah satu hal yang menjadikan beberapa kebijakan dan ketentuan CPTPP tidak relevan sesuai dengan traktat waitangi terutama dalam bidang *digital trade*. Pemerintah juga dinilai kurang serius dalam memperhatikan representasi Māori, dimana sebelumnya tidak terdapat representasi Māori

dengan mekanisme yang terstruktur yang menyebabkan Māori tidak memiliki akses langsung atau pengaruh struktural terhadap arah negosiasi. Terakhir pada saat penyusunan draft, meskipun terdapat pasal mengenai klausul khusus pengecualian traktat waitangi, tetapi traktat tersebut tidak disusun bersama Māori yang mengakibatkan perlindungan tersebut memiliki banyak celah dan tidak dapat menjamin perlindungan sesuai dengan yang diharapkan suku Māori, ditambah aspek penting lain yang tidak dilakukan Pemerintah *Treaty impact assessment* yang dilakukan secara menyeluruh sebelum Selandia Baru meratifikasi CPTPP.

Menyikapi gugatan dan kritik yang terus terjadi selama berlakunya CPTPP, dilihat berdasarkan kebijakan Pemerintah selama periode 2019 – 2023, Selandia Baru menunjukkan perubahan untuk menyelesaikan dan memperbaiki sedikit demi sedikit ketidakpuasan yang menyebabkan belum tercapainya perdagangan inklusif yang diharapkan, terutama pada kelompok Māori.

Berdasarkan beberapa sikap dan kebijakan yang ditunjukkan oleh Crown atau Pemerintah Selandia Baru, periode 2019-2023 menjadi periode dimana Selandia Baru berusaha melakukan perbaikan dalam rangka mengimplementasikan agenda trade for all dan mencapai perdagangan inklusif bagi setiap lapisan kelompok terutama Māori. Setelah apa yang dilakukan melalui kebijakannya, situasi dan hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah selama suku Māori melakukan gugatan dapat terlihat bahwa Pemerintah tidak hanya mengakui identitas Māori di level simbolik melainkan dapat terlihat dalam pengakuan kedaulatan dalam dimensi budaya, ekonomi, dan politik. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, dalam menciptakan sebuah perdagangan inklusif dan menghormati setiap kelompok yang tergabung diperlukan sebuah keadilan, dimana tidak hanya soal apa yang dibagi (redistribusi) dan siapa yang dihormati (rekognisi), tapi juga siapa yang didengar dan punya suara (representasi).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketiga dimensi yang digunakan untuk melihat perdagangan inklusif Māori melalui CPTPP awalnya terjadi perbedaan fokus antara Crown dan Māori, dimana Crown masih menganggap isu utama ada dalam dimensi ekonomi mengenai misredistribusi sebagai

penyebab paling besar tidak tercapainya perdagangan inklusif yang terlihat dalam working paper trade for all. Akan tetapi dengan pembentukan dewan penasihat, seperti TFAAB dan gugatan resmi Māori dalam laporan resmi tribunal Waitangi memperjelas bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam dimensi ekonomi dan dimensi politik yang dialami suku Māori.

Kebijakan Selandia Baru dalam melengkapi ketiga dimensi tersebut dapat terlihat dalam beberapa kebijakannya, seperti memperkuat kemitraan Māori sebagai treaty partner dengan membentuk lembaga-lembaga resmi sebagai representasi Māori dalam penentuan kebijakan ataupun negosiasi, strategi dan usaha dalam meningkatkan *capacity building* (penguatan kapasitas) atau kapabilitas dalam perdagangan internasional Māori, pembentukan TFAAB sebagai komite yang mengarahkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan berpaku kepada perdagangan yang inklusif, dsb.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Selama melakukan penelitian ini, Penulis mendapati beberapa saran praktis yang kiranya dapat menjadi wawasan baru yang mendukung ide terkait kebijakan Selandia Baru dalam mencapai perdagangan inklusif Māori melalui CPTPP pada periode 2019 – 2023. Saran-saran tersebut, yaitu Penulis merasa sebelum diratifikasinya sebuah FTA diperlukan kesepakatan antara Crown dan Māori terkait mekanisme dan sistematisasi terkait hal-hal yang harus dilakukan sebelum sebuah FTA diratifikasi, seperti seberapa banyak dan kepada siapa saja negosiasi dan diskusi antara Crown dan Māori dilakukan, apa saja pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam analisis awal dalam tahapan studi kelayakan untuk meyakinkan kedua pihak apakah FTA tersebut relevan dan tidak mengganggu hubungan suatu kelompok berdasarkan kepercayaannya (nilai budaya) terutama saran tersebut berkaca dari bagaimana gugatan dan kritisi yang terjadi dalam CPTPP.

Penulis turut menaruh perhatian terhadap isu *capacity building* terutama terhadap suku Māori, Penulis merasa bahwa diperlukannya

peningkatan *capacity building* secara kolaboratif antara pemerintah Selandia Baru dan Māori dengan kerangka dan sistem yang lebih jelas. Terakhir saran teoretis yang dapat Penulis sampaikan setelah meneliti terkait topik ini adalah perlunya Selandia Baru membuat dan merinci kebijakan yang lebih spesifik terhadap suatu FTA, dalam kasus ini adalah CPTPP, dikarenakan penulis mendapati bahwa masih banyak kebijakan yang bersifat “one policy fits all” yang bertudung dalam kerangka *trade for all*.

6.2.2 Saran Teoretis

Adapun saran teoretis yang dapat Penulis ajukan terkait kebijakan Selandia Baru dalam mencapai perdagangan inklusif Māori melalui CPTPP pada periode 2019 – 2023. Pada penelitian ini Penulis berfokus kepada sikap negara dalam mencapai kepentingan dalam FTA, dalam hal ini perdagangan inklusif Māori. Akan tetapi topik ini memiliki analisis yang sangat variatif, terutama dalam sudut pandang masyarakat adat beserta nilai kebudayaannya.

Untuk menyempurnakan pembahasan terkait topik ini Penulis menyarankan pada penelitian yang mendatang untuk mempertimbangkan menggunakan sudut analisis yang berbasis kepada kebudayaan berdasarkan nilai – nilai Māori. Salah satu yang Penulis ketahui terkait teori yang cukup relevan untuk membahas hal tersebut adalah teori Kaupapa Māori, yakni sebuah teori yang berkembang dan bertumpu atas *Te Ao Māori* (Māori worldview).

Penulis juga menilai bahwa diperlukan analisis lebih lanjut mengenai topik ini, terutama berdasarkan sudut pandang lembaga representasi Māori yang dibentuk berdasarkan agenda *trade for all*, seperti *te taumata*. Penulis percaya dengan dilakukannya analisis yang lebih dalam dan luas mampu memberikan perkembangan dan pembelajaran terkait perdagangan inklusif yang tercipta melalui sebuah FTA.